



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 330 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN SERTA
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK
PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENURUNAN
STUNTING MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan *stunting* nasional, dipandang perlu untuk memberikan insentif kepada daerah atas kinerja penanganan *stunting* di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengalokasian dan penyaluran Dana Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan dengan mempertimbangkan kebijakan pemberian dana insentif fiskal pada tahun berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (16) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri Keuangan dapat menetapkan Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan termasuk untuk Kategori Kinerja Penurunan *Stunting* menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan *Stunting* menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 398);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN SERTA RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENURUNAN *STUNTING* MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

- KESATU : Menetapkan:
- a. variabel kinerja, bobot, periode data, dan sumber data;
 - b. jumlah daerah peringkat terbaik menurut provinsi/kabupaten/kota;
 - c. formula penghitungan pengalokasian Dana Insentif Fiskal;
 - d. rincian jenis belanja penandaan *stunting* dan bobot belanja penandaan *stunting*; dan
 - e. dokumen syarat salur dan batas waktu penyampaian syarat salur,
- dalam rangka pengalokasian dan penyaluran Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan *stunting*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan *stunting* sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dengan rincian alokasi menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam hal terdapat sisa Dana Insentif Fiskal, sisa dana digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan;
6. Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 330 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN
PENYALURAN SERTA RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF
FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN
KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENURUNAN
STUNTING MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN
SERTA RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI
PENURUNAN *STUNTING* MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. VARIABEL KINERJA, BOBOT, PERIODE DATA, DAN SUMBER DATA

No.	Variabel Kinerja	Bobot	Periode Data	Sumber Data
Kabupaten/Kota				
a.	Dimensi <i>input</i>	15		
	Integrasi target prevalensi penurunan <i>Stunting</i> dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah	15	Semester I 2025	Kementerian Dalam Negeri
b.	Dimensi proses	45		
	1) Capaian pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2025	11,25	Semester I 2025	Kementerian Dalam Negeri
	2) Persentase keluarga sasaran yang melakukan registrasi melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil)	11,25	Semester I 2025	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	3) Balita yang dipantau pertumbuhannya	11,25	Semester I 2025	Kementerian Kesehatan
	4) Realisasi tertimbang Belanja Penandaan <i>Stunting</i>	11,25	Semester I 2025	Kementerian Keuangan
c.	Dimensi output	40		
	1) Ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 (enam) kali	13⅓	Semester I 2025	Kementerian Kesehatan
	2) Persentase Keluarga Berencana pasca persalinan	13⅓	Semester I 2025	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	3) Capaian imunisasi lengkap pada anak di bawah 2 (dua) tahun (baduta)	13⅓	Semester I 2025	Kementerian Kesehatan

Provinsi				
a.	Dimensi <i>input</i>	20		
	1) Pelaporan hasil penilaian kinerja konvergensi Kabupaten/Kota	10	Semester I 2025	Kementerian Dalam Negeri
	2) Integrasi target prevalensi penurunan <i>Stunting</i> dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah	10	Semester I 2025	Kementerian Dalam Negeri
b.	Dimensi proses	48		
	1) Pelaksanaan Pra-Musrenbang tematik <i>stunting</i>	8	Semester I 2025	Kementerian Dalam Negeri
	2) Penyampaian pelaporan belanja penandaan <i>stunting</i>	8	Semester I 2025	Kementerian Dalam Negeri
	3) Kendali Capaian Aksi Konvergensi	8	Semester I 2025	Kementerian Dalam Negeri
	4) Persentase keluarga sasaran yang melakukan registrasi melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil)	8	Semester I 2025	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	5) Balita yang dipantau pertumbuhannya	8	Semester I 2025	Kementerian Kesehatan
	6) Realisasi tertimbang belanja penandaan <i>stunting</i>	8	Semester I 2025	Kementerian Keuangan
c.	Dimensi <i>output</i>	32		
	1) Ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 (enam) kali	16	Semester I 2025	Kementerian Kesehatan
	2) Persentase Keluarga Berencana pasca persalinan	16	Semester I 2025	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Dalam hal data tidak tersedia, variabel kinerja tidak digunakan atau bernilai 0.

B. JUMLAH DAERAH PERINGKAT TERBAIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No	Jenis Daerah	Jumlah Peringkat Terbaik
1.	Provinsi	3 (tiga)
2.	Kabupaten	38 (tiga puluh delapan)
3.	Kota	9 (sembilan)

C. FORMULA PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN DANA INSENTIF FISKAL

1. Penghitungan pagu Dana Insentif Fiskal Kategori Penurunan *Stunting* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Pagu per} \\ \text{Daerah} \\ \text{provinsi/} \\ \text{kabupaten/} \\ \text{kota} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{jumlah Daerah terbaik} \\ \text{provinsi/kabupaten/kota} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{jumlah Daerah terbaik provinsi +} \\ \text{jumlah Daerah terbaik} \\ \text{kabupaten + jumlah Daerah} \\ \text{terbaik kota} \end{array}} \times \begin{array}{l} \text{pagu} \\ \text{Dana} \\ \text{Insentif} \\ \text{Fiskal} \end{array}$$

2. Penghitungan nilai persentase realisasi belanja penandaan *stunting* terhadap anggaran belanja Daerah dengan menggunakan rumus:

$$P_i = \frac{\begin{array}{l} \text{realisasi tertimbang belanja penandaan} \\ \text{stunting} \\ \text{Daerah (i)} \end{array}}{\text{anggaran belanja Daerah (i)}} \times 100$$

Keterangan:

P_i = nilai persentase realisasi tertimbang belanja penandaan *stunting* daerah (i)

Data anggaran belanja Daerah menggunakan data terbaru/termutakhir.

3. Penghitungan standardisasi nilai data bagi variabel kinerja yang nilai maksimalnya belum 100, dengan menggunakan rumus:

$$PS_i = \frac{P_i}{P_{\text{maks}}} \times 100$$

Keterangan:

PS_i = nilai data standar variabel kinerja x provinsi/kabupaten/kota ke-i

P_i = nilai data variabel kinerja x provinsi/kabupaten/kota ke-i

P_{maks} = nilai data terbesar dari variabel kinerja x provinsi/kabupaten/kota

4. Penghitungan nilai kinerja pemerintah kabupaten/kota (i) menggunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Nilai kinerja} \\ \text{kabupaten/} \\ \text{kota (X}_i\text{)} \end{array} = \begin{array}{l} (\text{nilai rata-rata dimensi input kabupaten/kota (i) X} \\ 15\%) + (\text{nilai rata-rata dimensi proses} \\ \text{kabupaten/kota (i) X 45\%}) + (\text{nilai rata-rata dimensi} \\ \text{output kabupaten/kota (i) X 40\%}) \end{array}$$

atau

$$\begin{array}{l} \text{Nilai kinerja} \\ \text{kabupaten/} \\ \text{kota (X}_i\text{)} \end{array} = \sum \begin{array}{l} \text{nilai variabel kinerja kabupaten/kota (i) X bobot} \\ \text{variabel} \end{array}$$

5. Penghitungan nilai kinerja pemerintah provinsi (i) menggunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Nilai kinerja} \\ \text{provinsi (X}_i\text{)} \end{array} = \begin{array}{l} (\text{nilai rata-rata dimensi input provinsi (i) X 20\%}) + \\ (\text{nilai rata-rata dimensi proses provinsi (i) X 48\%}) + \\ (\text{nilai rata-rata dimensi output provinsi (i) X 32\%}) \end{array}$$

atau

$$\begin{array}{l} \text{Nilai kinerja} \\ \text{provinsi (X}_i\text{)} \end{array} = \sum \begin{array}{l} \text{nilai variabel kinerja provinsi (i) X bobot variabel} \end{array}$$

6. Nilai kinerja pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilakukan standardisasi nilai untuk Daerah terbaik dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 0,3 + 1$$

Keterangan:

XS_i = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota terbaik ke-i

$X_{\min}$ = nilai kinerja terkecil provinsi/kabupaten/kota terbaik

$X_{\max}$ = nilai kinerja terbesar provinsi/kabupaten/kota terbaik

7. Penentuan alokasi Dana Insentif Fiskal untuk setiap daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Alokasi Daerah (i)} = \frac{\text{Nilai } XS_i}{\text{Nilai total } XS} \times \text{pagu per Daerah provinsi/kabupaten/kota}$$

Keterangan:

XS_i = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota ke-i

8. Alokasi Dana Insentif Fiskal untuk setiap daerah dilakukan pembulatan dengan mekanisme:

- (i) dibulatkan kepada ribuan terdekat;
- (ii) dalam hal total alokasi hasil pembulatan lebih kecil dari pagu Dana Insentif Fiskal, selisih tersebut dialokasikan kepada daerah dengan alokasi terendah;
- (iii) dalam hal total alokasi hasil pembulatan lebih besar dari pagu Dana Insentif Fiskal, selisih tersebut dikurangkan dari daerah dengan alokasi tertinggi.

D. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN *STUNTING* DAN BOBOT BELANJA PENANDAAN *STUNTING*

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,2
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,5
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,2
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,2
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,2
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,8
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,25
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Anak Usia Dini (PAUD)	0,25
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,25
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Anak Usia Dini (PAUD)	0,25
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP Anak Usia Dini (PAUD)	0,25
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,25
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,25
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,25
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar Anak Usia Dini (PAUD)	0,5
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,5
18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,5
19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Kesehatan Masyarakat			
20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	0,2
21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	0,2
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,2
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,2
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,2
25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	0,25

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
27	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	0,25
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,5
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,25
30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,378
31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,8
32	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1
33	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1
34	Program Pemenuhan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan	1

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Bayi Baru Lahir	
35	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1
36	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,8
37	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,8
38	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,75
39	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,25
40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,25
41	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
42	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,084
43	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,75
44	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1
45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,2
46	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1
47	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,8
48	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,2
49	Program Peningkatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber	0,8

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
50	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0,2
51	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,5
52	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0,2
53	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	0,2
54	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
			dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
55	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,2
56	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,25
57	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,25
58	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,8
59	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,2
60	Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,5
61	Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	0,5
62	Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
63	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,8
64	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
65	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
66	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,5
67	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
68	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
69	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	0,25
70	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,5
71	Program Pengelolaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembinaan dan Pemberdayaan	0,8

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
72	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,2
73	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,25
74	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	0,8
75	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,25
76	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,25
77	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0,5
78	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,25
79	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,25

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	an Sistem Penyediaan Air Minum	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
80	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	0,25
81	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	0,1
82	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	0,1
83	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	0,1
84	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	0,1
85	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	0,5
86	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0,5
87	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0,5
88	Program Pengelolaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan Sistem Pengelolaan	0,5

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Air Limbah Domestik Regional	Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
89	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
90	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,2
91	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,25
92	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	0,5
93	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
94	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
95	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0,5
96	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,5
97	Program Pengelolaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air	0,25

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
98	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,5
99	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0,25
100	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0,5
101	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0,25
102	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	0,5
103	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0,25
104	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0,5
105	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,25

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
106	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0,5
107	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	0,5
108	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,25
109	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0,8
110	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	0,5
111	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
112	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,25
113	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0,5
114	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,5
115	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah	0,25

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	an Sistem Air Limbah	dalam Daerah Kabupaten/Kota	Domestik (SPALD) Setempat	
116	Program Pengelolaan Dan Pengembangan an Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,8
117	Program Pengelolaan Dan Pengembangan an Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,2
118	Program Pengembangan an Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
119	Program Pengembangan an Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
120	Program Pengembangan an Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
121	Program Pengembangan an Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
122	Program Pengembangan an Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
123	Program Pengembangan an Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,8
124	Program Pengembangan an Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan	0,5

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
			Strategis Kabupaten/Kota	
125	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
126	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
127	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
128	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
129	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,8
130	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
131	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	0,5
132	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	0,25

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
133	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	0,25
134	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0,2
135	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0,2
136	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0,25
137	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	0,2
138	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0,2
139	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,5
140	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	0,2
141	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	0,2
142	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
143	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	0,2
144	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	0,8
145	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0,8
146	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	0,8
147	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0,8
148	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,25
149	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,308
150	Program Peningkatan Diversifikasi Dan	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Ketahanan Pangan Masyarakat	Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Berbasis Sumber Daya Lokal	
151	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	0,2
152	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,25
153	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0,8
154	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,5
155	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,25
156	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0,2
157	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	0,2
158	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
159	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,5
160	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0,2
161	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,2
162	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0,1
163	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,1
164	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	0,1
165	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	0,1
166	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	0,1
167	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	0,1
168	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0,1
169	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
170	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0,2
171	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0,2
172	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0,2
173	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0,2
174	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0,2
175	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0,2
176	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,2
177	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0,2
178	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	0,058823529

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	tan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
179	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,25
180	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,2
181	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0,25
182	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	0,2
183	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
184	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,2
185	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,2
186	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0,8
187	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,2
188	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,5
189	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,5
190	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,5
191	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0,5

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
192	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	0,5
193	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0,5
194	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	0,2
195	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i> (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1
196	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	0,5
197	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0,5
198	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	0,5

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
			Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
199	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,5
200	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,5
201	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	0,8
202	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
203	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,06
204	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0,2
205	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0,01
206	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0,5
207	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	0,2
208	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	0,5
209	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Dan Usaha Mikro (Umkm)	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
210	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0,2
211	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemulihan Usaha Mikro	0,2
212	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	0,2
213	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	0,2
214	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	0,2
215	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0,2
216	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,2
217	Program Pengolahan Dan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
218	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0,5
219	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,2
220	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,5
221	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,2
222	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	0,2
223	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
224	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0,2
225	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	0,2
226	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	0,2
227	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	0,2
228	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0,2
229	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	0,5
230	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0,2
231	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0,2
232	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	0,2
233	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
234	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0,2
235	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,2
236	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,2
237	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0,2
238	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0,2
239	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0,2
240	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,2
241	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Perencanaan Pembangunan Daerah		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
242	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,2
243	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,2
244	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,2
245	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,2
246	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	0,2
247	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	0,2
248	Program Pengelolaan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Inventarisasi dan Analisis Data	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
	Keuangan Daerah	Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bidang Keuangan Daerah	
249	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,2
250	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,2
251	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0,2
252	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,2
253	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,2
254	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,2
255	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0,2
256	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,2
257	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,2

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
258	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,2
259	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,2
260	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,5
261	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,5
262	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,5
263	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,5
264	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,2
265	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,2
266	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	0,75
267	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	0,75

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN	BOBOT
268	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	0,25
269	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	0,25
270	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	0,2
271	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	0,2
272	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,2

E. DOKUMEN SYARAT SALUR DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SYARAT SALUR

1. Dokumen Syarat Salur		
No.	Tahap I	Tahap II
1.	Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan	Rencana penggunaan Dana Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan
2.		Laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2024 bagi daerah yang mendapatkan Dana Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2024
2. Batas Waktu Penyampaian Dokumen Syarat Salur		
Tahap I		Tahap II
paling lambat tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.00		paling lambat tanggal 15 Desember 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia

Waktu Indonesia Barat, atau di hari kerja berikutnya apabila pada tanggal tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional.	Barat, atau di hari kerja berikutnya apabila pada tanggal tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional.
3. Penghentian Penyaluran	
Dana Insentif Fiskal tidak disalurkan dalam hal persyaratan penyaluran tahap I dan/atau tahap II belum diterima secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu yang ditentukan.	

F. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI KINERJA PENURUNAN *STUNTING* MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
1.	Provinsi Sumatera Utara	5.358.460
2.	Kab. Deli Serdang	5.611.684
3.	Kota Tebing Tinggi	5.461.683
4.	Kab. Batu Bara	5.836.438
5.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5.648.595
6.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.596.234
7.	Kab. Pringsewu	5.724.985
8.	Kab. Bandung	6.509.327
9.	Kab. Bogor	5.935.710
10.	Kab. Garut	5.673.252
11.	Kab. Karawang	6.997.236
12.	Kota Sukabumi	5.526.341
13.	Kab. Demak	5.983.618
14.	Kab. Kudus	6.008.720
15.	Kab. Pematang	5.655.294
16.	Kab. Sukoharjo	6.663.411
17.	Kab. Bojonegoro	5.902.726
18.	Kab. Jombang	6.590.448
19.	Kab. Lumajang	5.673.976
20.	Kab. Magetan	5.933.687
21.	Kab. Malang	5.671.990
22.	Kab. Mojokerto	6.922.979
23.	Kab. Nganjuk	5.687.981
24.	Kab. Pasuruan	7.147.236
25.	Kab. Tuban	5.709.750
26.	Kota Blitar	6.407.817
27.	Kota Madiun	7.100.187

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
28.	Kota Mojokerto	6.296.448
29.	Kota Batu	5.562.351
30.	Kab. Hulu Sungai Selatan	5.668.220
31.	Provinsi Sulawesi Tengah	5.675.543
32.	Kab. Morowali	5.701.860
33.	Kota Palu	6.169.810
34.	Provinsi Sulawesi Selatan	6.965.997
35.	Kab. Bantaeng	6.536.863
36.	Kab. Gowa	5.556.583
37.	Kab. Maros	6.006.958
38.	Kab. Pinrang	6.620.596
39.	Kab. Sinjai	5.600.297
40.	Kab. Sidenreng Rappang	5.652.576
41.	Kab. Takalar	6.111.456
42.	Kab. Wajo	5.596.017
43.	Kab. Ganyar	5.618.627
44.	Kab. Klungkung	5.625.746
45.	Kab. Tabanan	5.757.964
46.	Kab. Sumbawa Barat	5.726.760
47.	Kab. Tangerang	7.223.557
48.	Kota Serang	5.499.048
49.	Kota Tangerang Selatan	5.976.316
50.	Kab. Bintan	5.910.642
JUMLAH PROVINSI		18.000.000
JUMLAH KABUPATEN/KOTA		282.000.000
JUMLAH NASIONAL		300.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

